



RINGKASAN

ADEDWI AIRNURLISA. Penerapan Sistem Akuntansi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok (*Application of Financial Accounting Systems in the Depok City Archives and Library Office*). Dibimbing oleh FARIDA RATNA DEWI.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. Perpustakaan Umum Kota Depok berdiri tahun 2008 di Jl. Margonda Depok No. 54. Pada 27 April 2015 Gedung Perpustakaan Umum Kota Depok diresmikan Oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan telah dibuka untuk umum. Dengan diresmikannya gedung Perpustakaan Umum Kota Depok diharapkan akan mampu meningkatkan minat baca masyarakat Kota Depok. Perpustakaan Umum Kota Depok berdiri tahun 2008 di Jl. Margonda Depok No.54. 27 April 2015 Gedung Perpustakaan Umum Kota Depok diresmikan Oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan telah dibuka untuk umum. Dengan diresmikannya gedung Perpustakaan Umum Kota Depok diharapkan akan mampu meningkatkan minat baca masyarakat Kota Depok. Perlakuan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok berpedoman pada PP No 12 Tahun 2019, namun dikhawatirkan terdapat aspek kendala perundangan yang berganti-ganti mengakibatkan pelaksanaan menjadi lambat karena perlu penyesuaian dengan perundangan yang baru.

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sistem akuntansi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok yang digunakan dalam laporan keuangan adalah cash basis untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan accrual basis untuk pengakuan pendapatan operasional dan beban, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun neraca dengan menggunakan basis akrual.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Sistem Akuntansi Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.